Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan

The Impact of Divorce Law on Marital Property

Sugih Ayu Pratitis*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Harapan, Indonesia

*Corresponding Email: sugihayu85@gmail.com

Diterima: Juli 2019; Disetujui: Oktober 2019; Dipublish: Oktober 2019

Abstrak

Timbulnya masalah harta benda bersama dalam perkawinan biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami istri, atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama. Tujuan penelitian mengkaji kedudukan harta benda bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akibat hukum perceraian terhadap harta benda perkawinan. Metode penelitian digunakan adalah jenis penelitian normatif dimana penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti lebih dahulu bahan-bahan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian yang dihasilkan adalah kedudukan harta benda suami istri yang diperoleh dalam perkawinan adalah merupakan harta bersama terkecuali harta pribadi yang dibawah ke dalam perkawinan akan menjadi hak pribadi masing-masing suami atau istri. Sedangkan akibat terjadi perceraian antara suami istri maka harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi dua, setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Cara penyelesaian perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama adalah Apabila perceraian telah disetujui oleh hakim, maka suami istri dapat mengajukan permohonan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan apabila suami istri yang bercerai tidak mau melaksanakan pembagian harta bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama untuk memaksa pihak yang tidak mau melaksanakan putusan yang sesuai dengan apa yang diputus oleh Pengadilan Agama.

Kata kunci : Akibat Hukum, Perceraian, Harta Benda

Abstract

The emergence of the problem of joint property in a marriage is usually when there is a divorce between husband and wife, or when the divorce process is taking place in the Religious Court. The purpose of the study is to examine the position of joint property in marriage according to Islamic law and the provisions of the legislation and the legal consequences of divorce on marital property. The research method used is a type of normative research where research is carried out by first researching the materials that are in accordance with the problem to be studied. The result of this research is that the position of husband and wife property obtained in marriage is shared property except personal property which is under the marriage will be the personal rights of each husband or wife. While due to divorce between husband and wife, the assets obtained during marriage are divided in half for the husband and half for the wife. The method for resolving cases of sharing of shared assets at the Religious Court is if the divorce has been approved by a judge, then a husband and wife can submit a request for sharing of shared assets in accordance with applicable law. And if a divorced husband and wife do not want to carry out the distribution of shared assets, then one of the parties can submit a request for execution in the Religious Court to force those who do not want to carry out the decision in accordance with what was decided by the Religious Court.

Keyword: law consequences, divorce, marital property

How to Cite: Ayu Pratitis, S. (2019). Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan. *Doktrina: Journal of Law*. 2 (2): 151-163

PENDAHULUAN

Perkawinan yang dilaksanakan dengan dimulai adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami istri, maka akan senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan pada prinsip syariat Islam. Ketentuan ini telah sesuai dengan tujuan dan definisi dari perkawinan itu sendiri, dimana perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan suatu yang penting dalam realita kehidupan manusia. Karena dengan adanya hubungan perkawinan dalam rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam serta tata kehidupan masyarakat. Dalam hubungan rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis antara pria dengan wanita, mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. (Riswan Munthe dan Sri Hidayani, 2017, JUPIIS, Vol. 9 No. 2).

Keluarga yang baik, bahagia lahir bathin adalah dambaan setiap insan. Namun demikian, dalam membentuk hubungan yang harmonis tidaklah semudah kita bayangkan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, aman dan tentram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang demikian itu tidak mungkin terwujud apabila yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam membina rumah tangga yang kekal dan abadi. Disamping itu, pada prinsipnya perkawinan itu akan dilaksanakan hanya satu kali dalam suatu kehidupan seseorang.

Hukum perkawinan berlaku bagi tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Pengaturan hukum di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara nyata diatur dalam hukum positif yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap negara didunia mempunyai peraturan tentang perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama dalam melangsungkan perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan

perkawinan akan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi untuk sahnya suatu perkawinan selain perkawinan harus sah berdasarkan agama juga harus didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibuktikan atau peristiwa perkawinan itu telah diakui oleh negara. Hal ini penting artinya demi kepentingan suami istri itu sendiri, anak yang lahir dari perkawinan serta harta yang ada dalam perkawinan tersebut.

Konteks hukum perkawinan islam, jelas bahwa perkawinan adalah hukum allah yang berlaku dialam nyata. Karena itu islam telah mengatur setiap aspek kehidupan berkeluarga, bermula dalam memilih jodoh hingga pada tanggung jawab suami istri didalam rumah tangga (Mahmud Yunus, 1995). Dengan demikian perkawinan yang dilaksanakan secara sah akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam perkawinan, baik antara suami istri maupun terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau yang lahir akibat perkawinan tersebut dan juga masalah harta benda.

Apabila perceraian ini terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat hukum terhadap orang yang berkaitan dalam satu rumah tangga. Selain itu, akibat dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama perkawinan. Mengenai kedudukan harta benda perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pembagian harta benda bersama ini jelas diatur dalam undang-undang, hanya saja sebagai manusia biasa tidak lepas dari keinginan-keinginan untuk menguasai dan memiliki, kadang kala antara teori dan penerapan serta pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan itu sering kali tidak sejalan.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi objek harta bersama dalam perkawinan, sedangkan harta bawaan bersumber dari suami atau istri serta harta benda yang diperoleh dari hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perkawinan. (M. Yahya Harahap, 1975).

Menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, dan harta bawaan dari suami dan istri dan

harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Asas harta benda ini pokok utamanya adalah segala milik yang diperoleh selama perkawinan ialah harta pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama. Maka dalam arti yang umum, harta benda itu ialah barang-barang yang diperoleh bersama selama perkawinan dimana suami istri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan keluarganya. Dengan demikian pada prinsipnya harta bersama itu diatur bersama dan dipergunakan bersama dan dalam segala sesuatunya harus ada persetujuan bersama.

Akibat hukum dari perceraian suami istri adalah menyangkut tentang harta benda bersama. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur tentang status harta benda bersama jika terjadi perceraian. Sedangkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa pengaturan tentang pembagian harta bersama jika terjadi perceraian suami istri diserahkan kepada hukumnya masing-masing.

Mengenai hukum harta perkawinan yang dihasilkan antara suami dan istri sering kali kurang mendapat perhatian

dari ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan secara serius mengenai harta bersama perkawinan, karena pengaruhnya pada kehidupan suami dan istri apabila telah terjadi perceraian hidup. Munculnya harta bersama ini biasanya bersumber dari terjadinya perceraian antara suami istri, atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang sulit dalam penyelesaiannya sampai pada putusan akhir dan bahkan menyimpang dari penerapan perundang-undangan yang berlaku. (Abdul Manan, 2008)

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok kajian penelitian ini adalah kedudukan harta bersama dalam hubungan perkawinan menurut hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akibat perceraian terhadap harta benda perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Dalam penelitian ini, bahan kepustakaan dijadikan sebagai bahan utama dalam membahas dan menganalisa berbagai permasalahan yang diteliti.

Sedangkan data yang pakai yaitu data sekunder, dimana data penelitian terdiri dari 1) Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berkaitan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 2) Bahan hukum skunder, berupa buku, hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum, seperti jurnal, makalah-makalah dan lain-lain; 3) Bahan hukum tertier, berupa kamus umum, dan ensiklopedia serta website.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut:

Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*) dilakukan untuk menghimpun data sekunder dengan membaca dan mempelajari literatur- literatur, hasil- hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori- teori dan asas- asas, hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.

Penelitian Lapangan (*Field Research*), dilakukan untuk menumpulkan data sekunder dengan mempergunakan alat pengumpulan data berupa:

Studi dokumen yaitu dengan mempelajari berbagai peraturan hukum, literatur, hasil penelitian dan putusan pengadilan yang terkait dengan masalah pembagian harta bersama.

Pedoman wawancara yaitu mengadakan serangkaian tanya jawab secara lisan, bebas dan terstruktur dengan bentuk pertanyaan yang telah dipersiapkan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Analisis data penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, maka penelitian ini menjelaskan secara sistematis, faktual dan aktual serta populasi yang telah ditentukan mengenai sifat- sifat, karakteristik atau faktor- faktor tertentu yakni menggambarkan pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama. Kemudian meneliti lebih dahulu bahan- bahan yang sesuai dengan permasalahan, lalu menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Harta Bersama Dalam Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Harta bersama diartikan suatu harta benda kekayaan yang dihasilkan dalam hubungan suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan. Perkataan lain harta benda bersama itu adalah bentuk harta benda yang dihasilkan dengan jalan kerjasama antara suami istri sehingga

terjadi pertemuan harta benda yang satu dengan lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Dasar mengenai harta benda bersama bersumber dari Al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 32 yang maknanya bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula. (Abdul Manan, 2008)

Namun, ahli hukum Islam masih berlainan pendapat tentang dasar harta benda bersama sebagaimana tersebut diatas. Bahwa sebagian ahli mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta benda bersama dalam Al-Qur'an, maka karena itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya. Selain itu, pakar hukum Islam yang lain menjelaskan suatu yang tidak mungkin diatur dalam agama Islam mengenai pengaturan tentang harta bersama, sedangkan hal yang kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Sebab tidak ada satu pun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup kajian hukum Islam. Apabila tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka ketentuan itu pasti dalam Al-Hadis, karena Al-Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam juga, pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizham. (Abdul Manan, 2008)

Sedangkan hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik istri, dimana masing-masing pihak bebas mengatur hartanya masing-masing dan tidak diperkenankan adanya campurtangan salah satu pihak. Ketentuan hukum Islam tersebut sangat realistis, karena kenyataannya percampuran hak milik suami istri menjadi harta bersama banyak menimbulkan masalah dan kesulitan sehingga memerlukan aturan khusus untuk menyelesaikannya. Meskipun dalam hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta benda bersama ke dalam perkawinan terhadap harta benda pribadi masing-masing suami dan istri, tetapi dianjurkan supaya adanya saling memahami antara suami dan istri dalam mengelola harta benda pribadi. Agar jangan sampai di dalam mengelola kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami istri yang menjurus kepada perceraian.

Kedudukan harta benda bersama menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa harta benda dihasilkan selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Pada suami istri terhadap harta benda yang dihasilkan dari hadiah atau warisan, maka harta benda itu dibawah pengawasan masing-

masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan atas harta benda bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Kemudian dinyatakan pula bahwa suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta benda bersama tersebut diatur menurut hukum.

Sedangkan menurut Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat (2) KHI bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta benda tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau mengagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta benda pribadi mereka.

Undang-undang tidak membedakan kemampuan melakukan tindakan hukum

terhadap harta pribadi suami istri masing-masing. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, dimana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, begitu jua harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

Akibat Perceraian terhadap Harta Benda Perkawinan.

Persoalan harta benda bersama setelah terjadinya pemutusan hubungan perkawinan adalah merupakan masalah yang sangat penting untuk dijamin sebab menyangkut kehidupan khususnya bagi pihak istri setelah berpisah dari suami sebelum ataupun tidak sama sekali istri untuk melakukan perkawinan selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1968 No. 89 K/Sip/1969 yang menyebut selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta benda bersama yang dipegang olehnya tidak dapat dibagikan guna menjamin kehidupannya. Hal yang menjadi pertimbangan adalah bahwa masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi adanya persamaan hak atau yang lebih dikenal dengan emansipasi wanita adalah telah sesuai.

Pembagian terhadap harta benda bersama sebagai akibat putusnya perkawinan karena terjadinya perceraian antara suami istri telah diatur pada Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian hidup, maka pembagian harta benda bersama diatur menurut hukum masing-masing. Maka menurut penjelasan resmi pasal tersebut dapat diketahui yang dimaksud dengan hukum masing-masing yaitu berdasarkan ketentuan hukum agama, adat, dan hukum lainnya.

Kemudian, apabila memperhatikan penjelasan Pasal 37 secara resmi tidak memberikan keseragaman hukum positif (hukum yang berlaku) tentang bagaimana pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Mengenai tentang bagian yang dimaksud diatur tiada lain adalah pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Selanjutnya, cara pembagian harta bersama dalam ketentuan undang-undang dan meyerahkan kepada hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat (hukum kebiasaan) dimana perceraian dan rumah tangga berada. Kalau kita kembali kepada penjelasan Pasal 37 tersebut, maka peraturan telah menunjukkan gambaran cara pembagian harta benda bersama yaitu:

Dibagi pembagian berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian.

Aturan pembagian akan dilakukan menurut hukum adat atau kebiasaan, apabila hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 pembuat undang-undang telah berani dengan tegas meletakkan dasar hukum lembaga harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana lembaga hukum yang seragam untuk semua ikatan perkawinan di negara Republik Indonesia. Tetapi yang menyangkut pemecahan pembagian atas lembaga itu pembuat undang-undang tidak meletakkan cara pengaturan hukum yang seragam dalam pemecahannya apabila terjadi perceraian.

Keraguan dalam menetapkan ketentuan hukum dalam harta bersama apabila terjadi perceraian akan banyak membawa kesulitan di dalam menyelesaikan perselisihan dan dari segi kejiwaan. Hal ini akan membawa efek yang kurang baik ditinjau dari segi sosial psikologi baik bagi pihak-pihak yang berperkara maupun bagi lingkungan masyarakat sekitarnya. Sebagai contoh

antara suami istri terjadi perceraian, keduanya beragama Islam hingga perceraianya pun dilakukan di pengadilan agama. Tiba persoalan harta benda perkawinan, si suami bilang berlaku hukum agama islam, sebab itu harus diputuskan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan si istri lain pula pendiriannya dan mengajukan gugatan tersebut kepada pengadilan negeri. Memang benar bahwa mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tidak ada disebut dalam PP No. 45 Tahun 1975, sehingga yang berwenang untuk mengadili perselisihan dan pembagian perkara yang menyangkut harta bersama adalah pengadilan umum. Akan tetapi di dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan harta bersama dan hukum lainnya. Dari penjelasan ini bukankah mereka yang beragama islam berhak membawa persoalan ini kepada pengadilan agama, sekalipun PP No. 9 Tahun 1975 tidak menyebut hukum agama ini kasus agama islam.

Dengan demikian seseorang tidak melanggar kompetensi absolut jika seseorang meminta pembagian harta bersama dalam perkawinan dibawa ke pengadilan agama. Sebab dengan menyatakan hukum agama yang mengatur

persengketaan sesuatu tentu lebih persengketaan sesuatu lebih kompeten melali pengadilan agama yang akan menyelesaikannya. Dengan demikian jika dalam persoalan ini pembuat undang-undang telah berani melembagakan harta perkawinan dengan ketentuan hukum positif, maka secara logikanya pun juga harus ditentukan hukum positif yang seragam atau spesifik secara diferensiasi. Misalnya ditentukan dengan perceraian harta bersama di bagi dua antara suami istri.

Penegasan semacam ini akan menghilangkan perbedaan penafsiran yang menjauhkan tujuan hukum ini demi keseragaman. Ataupun jelas ditentukan secara diferensiasi, misalnya bagi yang beragam islam pembagian harta bersama karena perceraian diatur menurut hukum islam. Akan tetapi dalam pemikiran sipembuat undang- undang mengenai hal ini merasa dan berpendapat lebih baik tidak ditentukan satu pemecahan positif dengan maksud diserahkan saja kepada kehendak dan kesadaran masyarakat, dan hakimlah nanti yang akan mencari dan menemukan kesadaran hukum masyarakat untuk dituangkan sebagai hukum obyektif. Pembuat undang-undang berpikir tidak perlu ditentukan oleh *one way traffic* sebagai satu saluran secara

positif, sebab berdasarkan kenyataan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, tentang hal ini masih menuju perkembangan bentuk yang lebih serasi sebagai akibat meluasnya interaksi atas segala unsur kesadaran yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Namun terlepas dari masalah di atas jika melihat pada putusan pengadilan tentang pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, pada dasarnya sudah menuju yang terarah kesatu jurusan kaidah yang dipergunakan sebagai hukum objektif yang berbunyi: dengan terjadinya perceraian antara suami istri, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua bersama antara suami istri.

Yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan sebutan KHI, dikemukakan ada dua pertimbangan yaitu:

Bahawa sesuai dengan fungsi peraturan Mahkamah Agung terhadap jalannya pengadilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama, perlu mengadakan KHI yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.

Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib

administrasi dalam proyek pembangunan hukum islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keterangan diatas memberikan penjelasan bahwa langkah awal dari usaha untuk mewujudkan dari KHI ditandai dengan adanya kerjasama antara Badan Peradilan lewat Mahkamah Agung dengan lembaga Eksekutif melalui Departemen Agama. KHI mengatur tentang harta bersama sebagaimana tertuang dalam Bab XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 yaitu sebagai berikut:

Pasal 85 yang menyatakan bahwa :

Adanya harta bersama didalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami atau istri.

Pasal 86 yang menyatakan bahwa :

(3) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

(4) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 96 yang menyatakan bahwa :

Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta benda bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Pembagian harta benda bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suami mempunyai hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 yang menyatakan bahwa :

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 96 dan 97 KHI menjelaskan kedudukan harta bersama apabila salah satu pihak, baik suami maupun istri meninggal dunia, demikian halnya jika terjadi cerai hidup. Pada Pasal 96 KHI dijelaskan bila salah seorang diantara suami istri meninggal dunia maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, dan pada pasal 96 KHI juga menjelaskan posisi harta bersama bila salah seorang pasangan suami istri hilang. Jika ini terjadi maka harta harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya secara hakiki atau secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Sementara itu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam lebih khusus

menjelaskan posisi harta benda bersama bila suami atau istri cerai hidup. Pada pasal ini ditegaskan bahwa masing-masing pihak berhak mendapat seperdua dari harta benda bersama, kecuali lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal-pasal yang disebutkan diatas merupakan pokok-pokok hukum harta benda bersama. Masing-masing pasal saling berkaitan satu sama lainnya.

Ketentuan-ketentuan yang menurut M. Yahya Harahap dapat diringkas mengenai harta bersama yaitu, sebagai berikut:

Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing

Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri)

Harta bersama tetap menjadi harta bersama suami istri terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.

Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:

Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama

Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari

Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.

Tanpa persetujuan bersama: suami atau istri mengasingkan atau memindahkan

Hutang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama

Dalam perkawinan poligami, wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri.

Apabila perkawinan terjadi kematian ataupun perceraian hidup maka:

Harta bersama dibagi dua

Masing-masing mendapat setengah bagian

Apabila cerai mati bagiannya menjadi tirkah

Sita marital atas harta bersama di luar gugat cerai.

Dalam penjelasan diatas dapat diketahui Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai hukum positif Pengadilan Agama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan kedudukan harta benda suami istri yang diperoleh dalam perkawinan adalah merupakan harta bersama terkecuali harta pribadi yang dibawah ke dalam perkawinan akan menjadi hak pribadi masing-masing suami atau istri. Sedangkan akibat terjadi perceraian antara suami istri maka harta

yang diperoleh selama perkawinan dibagi dua, setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Hal ini juga terjadi dalam prakteknya di Pengadilan Agama, tanpa melihat dari suku atau masyarakat adat mana yang akan diceraikan. Hal ini dikarenakan sudah adanya kesadaran yang tinggi dari semua pihak tentang adanya persamaan hak antara pria dan wanita. Bila sewaktu terjadi perkawinan sudah ada perjanjian antara suami istri tentang harta maka harta bersama pembagiannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian antara pihak suami dan pihak istri. Cara penyelesaian perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama adalah apabila perceraian telah disetujui oleh hakim, maka suami istri dapat mengajukan permohonan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan apabila suami istri yang bercerai tidak mau melaksanakan pembagian harta bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama untuk memaksa pihak yang tidak mau melaksanakan putusan yang sesuai dengan apa yang diputus oleh Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, (2008), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
Binka LG Simatupang. & Taufik Siregar. (2017). *Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian*

- Terhadap Harta Gono-Gini . Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 4 (2) 2017: 30-35.
- Harahap, M. Y, (1975), Hukum Perkawinan Nasional, Medan; CV. Zahir Trading Co.Medan
- Syarifuddin. A, (2006), Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Prenana Media, Jakarta.
- Yunus, M, (1995), Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki; PT.Hidakarya Agung, 1995.
- Munthe. R dan Sri Hidayani, (2017), Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan, JUPIIS, 9 (2).
- Nisa, K. Hasibuan. H.A.L & Lubis, Z.M. (2017). Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Indonesia. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 4 (2). 50-59.
- Ritonga, D,S & Daulay, A,S (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan No.669/Pdt.G/2014/Pa-Mdn)Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 4 (1), 2017 : 8-15
- Undang- Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.